

ISSN 2088-1371



OPINIO JURIS

DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

VOLUME 19 | JANUARI - APRIL 2016

ARTIKEL

ASEAN Economic Impact for Indonesia

Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

Tinjauan Konstruktivisme Politik-Hukum Internasional dalam Pertimbangan Indonesia pada Pembentukan ASEAN Political-Security Community

Najamuddin Khairur Rijal, S.Ip., M.Hub.Int.

Urgensi dibentuknya Badan Peradilan Khusus Lingkungan Internasional dan Badan Pembersih Sampah Antariksa (*Space Debris*)

Sofian Ardi

Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar di Indonesia

Dr. Rika Ratna Permata, S.H., M.H. & Muthia Khairunnisa

RESENSI BUKU

The Oxford Handbook of The History of International Law

Eka An Aqimuddin, S.H., M.H.

GLOSSARY

TENTANG PENULIS.

Jurnal Hukum dan Perjanjian Internasional

OPINIO JURIS

Volume 19 ● Januari – April 2016

**DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN
INTERNASIONAL
KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2016**

Jurnal Hukum dan Perjanjian Internasional

OPINIO JURIS

Volume 19 ● Januari — April 2016

Diterbitkan oleh

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Kementerian Luar Negeri

Sejak Oktober 2009

Penanggung Jawab

Ferry Adamhar, SH, LL.M

Dr. iur. Damos Dumoli Agusman

Redaktur Pelaksana

M. Ichsan

Redaktur

Sudarsono, S.H., MM; Zainul Idris Yunus, S.E.; Mandala Sukarto Purba, S.H.;

Fajar Yusuf, S.H., LL.M;

Editor

Nenda Inasa Fadhilah, S.H., LL.M.; Ronald Eberhard, SH, LL.M; Aloysius Selwas Taborat, SH, LL.M; Anditya Hutama Putra, SH; Ahmad Almaudddy Amri, S.H., LL.M., M.Sc, Ph.D.; Maria Ayu Prabha Ardhanastri, S.H.; Dyan Radin Swastika, S.H.

Disain Grafis

Asep Hermawan S.H; Andre Bramantya, S.H.; Citra Yudha Nur Fatihah S.H.;

Muhammad Abdul Hayyil Al Ayyubi, S.H. M.Par.

Sekretariat

Maisaroh, S.Sos; Tasunah; Eddy Aswandi, S.Ip.; Karsim, S.E.

Alamat Redaksi:

Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Kementerian Luar Negeri

Jl. Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat

Telp. +62 21 3846633 Fax. +62 21 3858044; Email: opiniojuris@kemlu.go.id

Jurnal Opinio Juris versi digital dapat diunduh di website

<http://pustakahpi.kemlu.go.id/>

Tulisan yang dimuat dalam Jurnal Opinio Juris adalah pendapat dan analisis pribadi dari para penulis dan tidak mewakili pandangan/posisi Kementerian Luar Negeri dan/atau Pemerintah Republik Indonesia.

DAFTAR ISI

<i>Daftar Isi</i>	v
<i>Pengantar Redaksi</i>	vi
<i>ASEAN Economic Community Impact for Indonesia</i> <i>Ariawan Gunadi</i>	44
<i>Tinjauan Konstruktivisme Politik-Hukum Internasional dalam Pertimbangan Indonesia pada Pembentukan ASEAN Political- Security Community</i> <i>Najamuddin Khairur Rijal</i>	51
<i>Urgensi Dibentuknya Badan Peradilan Khusus Lingkungan Internasional dan Badan Pembersih Sampah Antariksa (Space Debris)</i> <i>Sofian Ardi</i>	8
<i>Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar Di Indonesia</i> <i>Rika Ratna Permata dan Muthia Khairunnisa</i>	15
<i>Resensi Buku</i> <i>The Oxford Handbook of The History of International Law</i> <i>Eka An Aqimuddin</i>	116
<i>GLOSSARY</i>	108
<i>TENTANG PENULIS</i>	111

PENGANTAR REDAKSI

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi diseminasi informasi terkait isu-isu hukum dan perjanjian internasional, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional telah menerbitkan Jurnal Hukum dan Perjanjian Internasional yang diberi nama “Jurnal Opinio Juris”.

Dalam Jurnal Opinio Juris edisi 19, redaksi memutuskan untuk meningkatkan keragaman artikel dalam Jurnal Opinio Juris Volume 19. Lima penulis mengangkat berbagai aspek, seperti Tinjauan Konstruktivisme Politik-Hukum Internasional dalam Pertimbangan Indonesia pada Pembentukan ASEAN Political-Security Community oleh Najamuddin Khairur Rijal, Urgensi Dibentuknya Badan Peradilan Khusus Lingkungan Internasional dan Badan Pembersih Sampah Antariksa (Space Debris) oleh Sofian Ardi, ASEAN Economic Community Impact for Indonesia oleh Ariawan Gunadi, Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar di Indonesia oleh Rika Ratna Permata dan Muthia Khairunnisa. Kolom resensi diisi oleh Eka An Aqimuddin atas buku berjudul *The Oxford Handbook of The History of International Law*.

Dalam kesempatan ini, redaksi Opinio Juris juga hendak mengucapkan terima kasih kepada para anggota redaksi terdahulu yang telah mendapat penugasan baru di beberapa Perwakilan RI atas dedikasinya dalam memajukan Opinio Juris. Redaksi juga mengajak para pembaca untuk turut berkontribusi serta memberikan saran dan masukannya demi peningkatan kualitas Opinio Juris di masa mendatang melalui email opiniojuris@kemlu.go.id.

Untuk memudahkan para pembaca setia Opinio Juris, Redaksi telah memuat Opinio Juris yang pernah terbit terdahulu pada

Perpustakaan Hukum Digital (*e-library*) Kemlu yang dapat di akses melalui <http://pustakahpi.kemlu.go.id/>. Pada kesempatan ini, Redaksi Opinio Juris secara terus menerus mengajak para pembaca untuk turut menyumbangkan tulisan, memberikan saran dan masukannya demi peningkatan kualitas Opinio Juris di masa mendatang.

Akhir kata, Redaksi Opinio Juris berharap semoga jurnal ini dapat bermanfaat serta menjadi sarana dalam menyebarluaskan informasi dan wadah sumbangsih pemikiran di bidang hukum dan perjanjian internasional yang berkaitan dengan pelaksanaan hubungan luar negeri.

Terima kasih dan selamat membaca.

Redaksi Opinio Juris

**TINJAUAN KONSTRUKTIVISME POLITIK-HUKUM
INTERNASIONAL DALAM PERTIMBANGAN INDONESIA PADA
PEMBENTUKAN ASEAN *POLITICAL-SECURITY COMMUNITY***

Najamuddin Khairur Rijal, S.IP., M.Hub.Int.

Abstract

ASEAN Political-Security Community (APSC) is one of the three pillars of ASEAN Community. It is a proposal suggested from Indonesia in ASEAN Summit Conference 2003 in Bali. APSC is an ASEAN's states cooperation efforts to create common security, regional peace and stability. This study analyze about what is Indonesia's consideration to suggest formation of APSC. That proposal not only because Indonesia has strategic national interest or because Indonesia want revert to be center of ASEAN, but according to constructivism of international political-law, Indonesia also has idiographic, purposive, ethical and instrumental consideration.

Keywords: ASEAN; ASEAN Political-Security Community; Indonesia; constructivism; politic; international law

Pendahuluan

ASEAN Political-Security Community (APSC) merupakan salah satu dari tiga pilar *ASEAN Community*, selain *ASEAN Economic Community* (AEC) dan *ASEAN Socio-Cultural Community* (ASCC). APSC merupakan upaya kerja sama negara-negara ASEAN dalam mewujudkan keamanan bersama, perdamaian dan lingkungan yang stabil untuk memajukan ASEAN sebagai organisasi regional. Jika pembentukan pilar AEC diusulkan oleh Singapura dan Thailand sebagai dua negara ASEAN yang perekonomiannya tergolong cukup maju, maka APSC merupakan konsep yang diajukan oleh Indonesia.²⁰

Dalam pandangan Indonesia, ancaman terorisme dan implikasinya terhadap ASEAN merupakan salah satu alasan yang mendorong mengapa ASEAN perlu mengembangkan APSC, yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama politik dan keamanan antar negara anggota ASEAN.²¹ Sekalipun perlu ditegaskan, bahwa APSC bukan hanya memberikan perhatian terhadap terorisme sebagai ancaman bersama, melainkan kerangka APSC mencakup seluruh aspek politik-keamanan yang menjadi tantangan kerja sama regional ASEAN, termasuk masalah demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Selain itu, konsep komunitas politik-keamanan yang dicanangkan Indonesia juga mengetengahkan pengembangan suatu lingkungan yang adil,

²⁰ Konsep APSC yang diajukan Indonesia banyak diilhami oleh tulisan Rizal Sukma berjudul “The Future of ASEAN: Towards a Security Community”. Paper dipresentasikan dalam seminar *ASEAN Cooperation: Challenges and Prospects in the Current International Situation*. New York, 3 Juni 2003. Lihat dalam CPF. Luhulima, et al., *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan P2P LIPI, 2008), hal. 90.

²¹ Bambang Cipto, *Hubungan Internasional Asia Tenggara: Teropong terhadap Dinamika, Realitas dan Masa Depan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 81.

demokratis dan serasi (*harmonious*) serta penegakan hak-hak dan kewajiban asasi manusia. Dengan mengetengahkan demokrasi dan HAM, Indonesia memperluas keamanan komprehensif dari *regime security* (keamanan negara dan pemerintahan) ke *human security* (keamanan manusia/warga negara).²² Artinya, Indonesia ingin mendorong kerja sama politik-keamanan tidak hanya berfokus pada upaya membangun hubungan damai antar negara tetapi juga mencegah terjadinya kekerasan di dalam negeri.²³ Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia ingin menciptakan APSC yang tidak saja *state oriented* tetapi juga *people oriented*. Mengingat ASEAN acapkali dikritik sebagai organisasi regional yang hanya memberi ruang bagi pemerintah (*state oriented*) tanpa keterlibatan warga negara Asia Tenggara.

Pertanyaan yang menarik kemudian adalah apa yang menjadi pertimbangan Indonesia mengusulkan pembentukan APSC sebagai salah satu pilar *ASEAN Community*? Jawaban pertanyaan tersebut tentu bukanlah sekadar memberikan argumen bahwa Indonesia memiliki kepentingan strategis (*national interest*) dalam APSC ataupun karena Indonesia berupaya kembali mengetengahkan dirinya sebagai *center of ASEAN*. Namun lebih jauh dari itu, ada faktor-faktor dan pertimbangan yang mendorong Indonesia menekankan pentingnya pembentukan APSC sebagai kerangka kerja sama ASEAN guna menjadi organisasi regional yang kokoh dan stabil. Tulisan ini selanjutnya berusaha menjawab pertanyaan di atas dengan mendasarkan analisis pada pandangan perspektif konstruktivis dalam politik-hukum internasional untuk menganalisis alasan atau pertimbangan Indonesia mengusulkan pembentukan ASPC.

²² CPF. Luhulima, *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan P2P LIPI, 2011), hal. 316.

²³ CPF. Luhulima, et al., *op.cit.*

Perspektif Konstruktivisme dalam Politik Hukum Internasional

Dalam studi politik-hukum internasional, terdapat tiga pendekatan untuk melihat hubungan antara politik internasional dan hukum internasional.²⁴ *Pertama* adalah pendekatan realisme yang melihat politik sebagai perjuangan untuk mencapai kekuasaan materiil di antara negara berdaulat. *Kedua*, pendekatan liberal institusional yang diasosiasikan sebagai kelompok rasionalis memaknai politik sebagai ladang permainan strategis (*strategic game*) para aktor sebagai instrumen untuk memaksimalkan keuntungan atau kepentingannya. Hukum internasional, dalam pandangan ini, dipandang sebagai seperangkat aturan untuk menyelesaikan masalah kerja sama dalam sebuah tatanan dunia yang anarki. *Ketiga*, pendekatan konstruktivis yang menekankan bahwa politik merupakan bentuk tindakan yang terbentuk secara sosial, hukum sebagai pusat struktur normatif yang menentukan suatu tindakan aktor yang terlegitimasi dan dapat dibenarkan.

Lebih lanjut, dalam pandangan konstruktivis, tindakan negara tidak sepenuhnya hanya didasarkan pada motif-motif politik, ekonomi, dan militer ataupun didasarkan pada maksimalisasi keuntungan di bawah tatanan dunia yang anarki dengan pertimbangan untung rugi, melainkan juga bagaimana aspek normatif, ideasional, dan identitas menjadi penting dalam membentuk tindakan dan perilaku negara.²⁵ Untuk itu, pandangan

²⁴ Christian Reus-Smit, *The Politics of International Law* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2004), hal 15.

²⁵ Dalam Deni Meutia dan Yoga Suharman, *Pembentukan Piagam ASEAN: Tinjauan Konstruktivisme Politik Hukum Internasional*, Makalah, hal. 5-6. Dipresentasikan dalam Konvensi Nasional III Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) di HI UMM pada 8-10 Oktober 2012.

konstruktivis menawarkan tiga preposisi penting dalam kajian politik-hukum internasional, sebagaimana dijelaskan Christian Reus-Smit.²⁶

Pertama, dalam membentuk tindakan dan perilaku negara serta aktor lainnya, struktur normatif dan ideasional dipandang sama pentingnya dengan struktur material. Menurutnya, tindakan atau respons suatu negara tidak hanya ditentukan oleh faktor lingkungan material, tetapi juga faktor kepercayaan intersubjektif yang membentuk identitas aktor dan kepentingannya.²⁷ *Kedua*, untuk memahami perilaku negara dan aktor lainnya, perlu memahami bagaimana kondisi identitas sosial mengonstruksi kepentingan dan tindakan mereka. *Ketiga*, konstruktivis menekankan pentingnya kekuatan konstitutif dari struktur normatif dan ideasional yang muncul ketika terjadi praktek diskursus antara agen sosial yang saling berpengetahuan sehingga mereka sama-sama sadar akan perlunya perubahan-perubahan transformatif.²⁸

Lebih lanjut, dalam konteks konstruktivisme politik-hukum internasional, Reus-Smit mengajukan empat alasan atau faktor penentu tindakan aktor dan proses terbentuknya institusi modern politik-hukum internasional, yaitu *idiographic*, *purposive*, *ethical* dan *instrumental*.²⁹ Pertama, pertimbangan *idiographic*, yakni ketika aktor menghadapi pertanyaan ‘*who am I?*’ atau ‘*who are we?*’ atau mengenai identitas yang dimiliki. Kedua, pertimbangan *purposive*, berhubungan dengan pertanyaan

²⁶ Christian Reus-Smit, *op.cit.*, hal 21-22.

²⁷ Alexander Wendt, “Constructing International Politics,” 1995, *International Security*, hal. 73; Alexander Wendt, *Social Theory of International Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999) hal. 92-138; dan Alexander Wendt and Raymond Duvall, “Institutions and International Order,” dalam Ernst-Otto Czempiel and James N. Rosenau (eds.), *Global Changes and Theoretical Challenges: Approaches to World Politics for the 1990s* (Lexington: Lexington Books, 1989), hal. 60. Dikutip dalam *ibid*, hal. 22.

²⁸ Alexander Wendt, “The Agent Structure Problem in International Relations Theory,” 1987, *International Organization*, dalam *ibid*.

²⁹ *Ibid*, hal. 25

‘what do I want?’ atau *‘what do we want?’*. Aspek ini berhubungan dengan proses pembentukan kepentingan atau preferensi serta tujuan yang diharapkan.

Ketiga, pertimbangan *ethical*, berhubungan dengan pertanyaan *‘how should I act?’* atau *‘how should we act?’* yaitu berkaitan dengan norma dan standar moral yang menuntun perilaku negara serta apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Keempat, pertimbangan *instrumental* yang berkaitan dengan pertanyaan *‘how do I get what I want?’* atau *‘how do we get what we want?’* yakni bagaimana negara bisa mendapatkan apa yang ingin mereka capai. Elemen ini berkorelasi dengan metode atau instrumen apa yang digunakan. Keempat elemen tersebut selanjutnya akan digunakan untuk menjelaskan perilaku atau pertimbangan Indonesia dalam mengusulkan kerangka APSC sebagai satu pilar dalam ASEAN Community.

Sejarah Perkembangan APSC

Tujuan utama ASEAN sebagaimana tertuang dalam Deklarasi ASEAN di Bangkok ialah membentuk suatu wilayah politik dan keamanan bersama dan dalam usaha itu mendamaikan persengketaan antar negara-negara di Asia Tenggara.³⁰ Persengketaan yang melibatkan negara-negara Asia Tenggara pada waktu itu seperti sengketa perbatasan dan teritorial, konflik etnis dan permusuhan yang memunculkan gerakan separatis, pemberontakan komunis, prasangka agama serta ketakutan negara kecil terhadap negara besar. Untuk itu, negara-negara Asia Tenggara berupaya

³⁰ Berdasarkan Pasal 1 *ASEAN Charter*, terdapat 15 tujuan dari ASEAN yang menyangkut aspek politik, keamanan, ekonomi ataupun sosial-budaya. Baca ASEAN Secretariat, *ASEAN Charter* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2008), hal. 3-5.

untuk mengelola persengketaan tersebut menuju pembentukan suatu tatanan regional Asia Tenggara atas dasar sistem ekonomi dan sosial masing-masing dan *status quo* teritorial.³¹

Jadi sesungguhnya, sejak awal dibentuknya, ASEAN sudah merupakan komunitas keamanan (*security community*) karena semangat awal didirikannya adalah guna menyelesaikan berbagai problem keamanan yang lebih banyak menyangkut hubungan bilateral. Apalagi butir penting awal pembentukan ASEAN sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Bangkok ditujukan untuk memajukan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara.

Dalam perkembangannya, tahun 1971 ASEAN kemudian melembagakan ASEAN sebagai suatu *community of security interest* melalui Deklarasi *Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN) untuk memperluas wilayah keamanan atau pembentukan wilayah penyangga keamanan Asia Tenggara. Menurut Luhulima, deklarasi ZOPFAN sejatinya adalah ekspresi dari ketidaksetujuan ASEAN untuk membolehkan negara-negara besar, seperti China, Jepang, Uni Soviet dan Amerika Serikat melibatkan diri secara tidak terbatas di wilayah Asia Tenggara.³²

Dengan demikian, perhatian ASEAN terhadap masalah dan isu-isu keamanan adalah merupakan perhatian utama. Sejak awal berdirinya ASEAN, diperlukan suatu tatanan keamanan yang memungkinkan untuk melangsungkan kerja sama di bidang ekonomi, sosial dan budaya serta bidang lainnya. Untuk itu, dalam rangka mendukung dan mewujudkan berbagai tujuan dan cita-cita ASEAN, negara-negara ASEAN kemudian menyadari pentingnya kerangka legal formal dalam kerja sama keamanan.

³¹ CPF. Luhulima, *op.cit.*, hal. 303.

³² *Ibid*, hal. 304.

Maka lahirlah ide pembentukan komunitas keamanan ASEAN melalui APSC.

Pembentukan APSC merupakan suatu upaya untuk mewujudkan Asia Tenggara yang damai dan stabil. Ide pembentukan APSC pertama kali muncul pada Konferensi Tingkat Tinggi (KKT) ke-9 di Bali tahun 2003. Ide APSC tersebut merupakan salah satu dari tiga pilar *ASEAN Community Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)* selanjutnya menandai awal terbentuknya *ASEAN Community* yang berusaha diwujudkan pada 2020, kemudian dipercepat menjadi akhir tahun 2015.

Lebih lanjut, meskipun sebagai komunitas yang berarti negara-negara ASEAN digiring dalam *common identity*, namun norma-norma kerja sama APSC tetap berpegang teguh pada prinsip kedaulatan nasional, non-intervensi, integritas teritorial, identitas nasional, prinsip non-kekerasan dalam penyelesaian konflik, penolakan senjata nuklir dan senjata pemusnah massal, serta menghindari perlombaan senjata (*arms race*) di kawasan Asia Tenggara.³³ Selain itu, komunitas keamanan juga harus tetap mencegah terjadinya persengketaan antar sesama negara ASEAN dan antara negara ASEAN dengan negara non-ASEAN, mencegah eskalasi konflik hingga berujung pada konflik terbuka dan berupaya mencari langkah penyelesaian.

Sebagaimana dijelaskan dalam buku *ASEAN Selayang Pandang*, bahwa APSC bersifat terbuka, berdasarkan pendekatan keamanan komprehensif dan tidak ditujukan untuk membentuk suatu pakta pertahanan atau aliansi militer maupun kebijakan luar negeri bersama (*common foreign policy*). APSC juga mengacu kepada berbagai instrumen politik ASEAN yang telah ada seperti ZOPFAN, Traktat Persahabatan dan Kerja Sama Negara-Negara ASEAN (*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia/TAC*) dan

³³ *Ibid*, hal. 324.

Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (*Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone/SEANWFZ*), selain menaati Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional terkait lainnya.³⁴

Elemen Konstruktivisme Indonesia dalam Pembentukan APSC

APSC merupakan konsep yang diajukan oleh Indonesia dalam *Bali Concord II* yang menandai terbentuknya *ASEAN Community*. Dalam pandangan konstruktivisme, terdapat empat faktor atau pertimbangan yang mendasari perilaku Indonesia terkait usulan pembentukan APSC. Bagaimana keempat faktor tersebut menjelaskan perilaku Indonesia dalam kerangka konstruktivisme?

1. Faktor *Idiography*

Identitas Indonesia sebagai salah satu negara pendiri ASEAN selain Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki peran penting dalam perkembangan ASEAN. Terlebih, Indonesia pernah menjadi episentrum ASEAN sehingga adanya APSC diharapkan mampu kembali mengetengahkan posisi Indonesia yang perlu diperhitungkan dalam kerangka kerja sama ASEAN.

Selain karena alasan di atas, kenyataan menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dan negara terbesar di Asia Tenggara. Dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia serta keragaman etnis dan budaya, Indonesia membutuhkan suatu situasi yang aman dan stabil untuk memelihara keutuhan wilayah dan masyarakatnya. Situasi stabil tersebut

³⁴ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang*. Edisi ke-19 (Jakarta: Sekretariat ASEAN, 2010), hal. 31-32.

hanya dapat dicapai melalui kerja sama keamanan yang komprehensif. Agenda keamanan dibutuhkan Indonesia dalam upaya menjaga keutuhan negara kesatuan yang multikultur tersebut.

Beberapa alasan lain mengapa Indonesia mengambil prakarsa mengusulkan konsep APSC dikemukakan oleh Rizal Sukma.³⁵ Pertama, sejak reformasi 1998 yang membawa Indonesia menjadi negara demokrasi, agenda demokrasi dan HAM menjadi isu utama dalam kehidupan berbangsa yang ikut memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Sehingga, sebagai negara demokrasi yang mensyaratkan adanya penghargaan terhadap HAM, Indonesia memandang perlunya ASEAN menyusun instrumen tersebut guna lebih peduli pada komunitas masyarakat ASEAN (*people oriented*), setelah selama ini lebih bersifat *state oriented*.

Kedua, pengalaman Indonesia dalam menghadapi kekerasan di Timor Timur pada 1999 dan ketidakberdayaan ASEAN mengambil peran utama, mendorong Australia lebih mendominasi dengan menempatkan pasukan keamanan internasional. Hal ini sesungguhnya menjadi pelajaran bagi ASEAN untuk lebih berperan dalam memelihara perdamaian regional tanpa melibatkan negara di luar kawasan Asia Tenggara.

Ketiga, Indonesia berpendapat bahwa setelah *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) mulai diimplementasikan serta disetujuinya usul Singapura tentang *ASEAN Economic Community*, kerja sama ASEAN lebih banyak didominasi oleh isu ekonomi. Sementara kerja sama di bidang politik-keamanan kurang mendapat perhatian. Padahal keamanan merupakan prasyarat utama terwujudnya regionalisme Asia Tenggara yang kondusif. Untuk itu, konsep APSC diajukan Indonesia sebagai payung kerja sama keamanan ASEAN menuju terwujudnya Komunitas ASEAN. Menurut Severino, harus diakui

³⁵ Dalam CPF. Luhulima, et al., *op.cit.*, hal. 90-92.

pula bahwa selama ini Indonesia lebih menaruh perhatian terhadap masalah politik-keamanan dalam ASEAN daripada masalah ekonomi. Hal itu karena Indonesia menyadari merasa kalah bersaing di bidang ekonomi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Singapura dan Malaysia.³⁶

2. Faktor *Purposive*

Elemen *purposive* mengapa Indonesia berada di garda depan dalam memajukan konsep APSC adalah menyangkut mengenai *what do Indonesia want?* Indonesia mendorong kerja sama keamanan melalui APSC adalah dalam upaya membangun hubungan damai antar negara anggota. Dengan situasi damai selanjutnya memungkinkan setiap negara anggota dapat mengembangkan kerja sama bilateral maupun multilateral serta meneguhkan kohesivitas ASEAN.

Sasaran kerja sama keamanan dalam upaya menciptakan situasi damai itu diarahkan pada upaya menangkal persengketaan di antara sesama negara anggota maupun negara anggota dengan non-anggota, mencegah eskalasi persengketaan itu menjadi konflik. Jika seandainya konflik tidak terhindarkan, kerangka kerja sama APSC akan membatasi ruang lingkup konflik tersebut sekecil mungkin dan perlu segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Pencegahan itu dilakukan dengan pembangunan kepercayaan, diplomasi preventif, dan kerja sama dalam masalah keamanan konvensional dan non-konvensional.³⁷

³⁶ Lihat Rodolfo C. Severino, *Southeast Asian in Search of an ASEAN Community. Insights from the Former ASEAN Secretary General* (Singapura: ISEAS, 2006), khususnya Bab 7. Dalam *ibid*, hal. 92.

³⁷ *Ibid*, hal. 39.

Lebih jauh dari itu, APSC diharapkan tidak hanya mengedepankan hubungan damai antar negara tetapi juga hubungan damai di dalam negeri masing-masing negara anggota. Untuk itu, demokrasi dan perlindungan terhadap HAM dipandang Indonesia perlu dimajukan guna mencegah terjadinya kekerasan di dalam negeri. Dengan mengetengahkan demokrasi dan HAM, Indonesia memperluas konsep keamanan dari keamanan pemerintahan (*regime security*) ke keamanan manusia (*human security*).

3. Faktor *Ethical*

Elemen *ethical* menjadi landasan norma moral yang menjadi pertimbangan Indonesia dalam mengusulkan APSC. Transformasi ke *human security* yang ditekankan dalam APSC melalui demokrasi dan HAM sesungguhnya merupakan bagian integral dalam mengamankan kehidupan bangsa-bangsa ASEAN. Menurut Hassan Wirajuda, nilai-nilai demokrasi dan HAM perlu dibina karena nilai-nilai tersebut akan sangat mengurangi sumber-sumber konflik baik antar negara maupun intra negara.³⁸ Pengamanan hidup manusia (*human security*) dalam payung demokrasi dan HAM akan sekaligus mengamankan kehidupan bangsa-bangsa ASEAN karena keamanan manusia mencakup seluruh spektrum keamanan yang sangat luas.

Lebih lanjut, kerangka komunitas keamanan yang diusulkan Indonesia sesungguhnya tidaklah beranjak dari apa yang dipraktikkan selama ini oleh ASEAN melalui prinsip *ASEAN Way*. Prinsip-prinsip tidak tertulis dalam *ASEAN Way* itu adalah menentang kekerasan dan mengutamakan solusi damai (pembuatan keputusan melalui konsensus), otonomi regional, prinsip

³⁸ Dalam Lokakarya IV *ASEAN Regional Mechanism on Human Rights* di Jakarta pada 17 Juni 2008. Dalam CPF. Luhulima, *op.cit.*, hal. 206.

tidak mencampuri urusan negara lain (non-intervensi), menolak pembentukan aliansi militer dan menekankan kerja sama bilateral (penyelesaian konflik secara damai).³⁹

Selain itu, APSC tetap berpegang pada norma-norma yang telah disepakati bersama. Antara lain upaya *confidence building measure* (CBM), *preventive diplomacy* dan *conflict resolution*. Serta, traktat-traktat yang telah diterima bersama seperti *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC), *Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN) dan traktat *Southeast Asian Nuclear Weapons Free Zone* (SEANWFZ).

4. Faktor *Instrumental*

Elemen terakhir pendekatan konstruktivis dalam politik-hukum internasional adalah pertanyaan mengenai bagaimana mencapai apa yang diinginkan. Dalam konteks ini, bagaimana mencapai harapan yang Indonesia usulkan melalui pembentukan APSC. Draf yang diusulkan Indonesia dalam APSC sesungguhnya lebih banyak mengandung ide orisinal yang cukup radikal.⁴⁰

Instrumen yang ditawarkan adalah perlunya pendefinisian prinsip non-intervensi secara lebih fleksibel. Hal itu dimaksudkan agar negara anggota lebih terbuka terhadap saran dan keterlibatan para anggota lainnya apabila ada masalah yang bersifat lintas batas atau menimbulkan krisis kemanusiaan. Selain itu, Indonesia mengusulkan perlunya mendirikan

³⁹ Lebih lanjut baca Amitav Acharya, *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order* (Landon: Routledge, 2001), hal. 45. Baca dalam Bambang Cipto, *op.cit.*, hal. 23.

⁴⁰ Dalam CPF. Luhulima, et al., *op.cit.*, hal. 96.

mekanisme regional perlindungan HAM agar ASEAN memajukan demokrasi dan HAM.

Ide lainnya adalah perlunya pembentukan pasukan perdamaian regional sehingga ASEAN memiliki kemampuan untuk memainkan peran aktif dalam pemeliharaan perdamaian dan *post-conflict peace building*. Indonesia juga menambahkan perlunya suatu tata aturan pemeliharaan perdamaian regional atau *regional peace keeping arrangement* serta pembentukan lembaga-lembaga pendukung bagi upaya penyelesaian konflik.⁴¹ Selain itu, Indonesia juga mengusulkan diadakannya kerja sama maritim tingkat regional dan peningkatan kerja sama di bidang pertahanan serta *ASEAN Extradition Treaty*.⁴²

Namun kemudian, beberapa usul Indonesia yang diajukan di KTT Bali tahun 2003 itu mendapat penentangan dari beberapa negara anggota ASEAN karena dinilai melangkah terlalu jauh. Mengenai ide pembentukan pasukan perdamaian dipandang terlalu *premature*. Kerangka APSC yang akhirnya disetujui juga tidak secara eksplisit berbicara tentang komitmen memajukan demokrasi dan HAM, sehingga tampak bahwa ASEAN tidak mengalami pergeseran kerja sama politik-keamanan menjadi *people oriented*.

Akan tetapi, dalam *Vientiane Action Programme* (VAP) pada 2004 yang merumuskan rencana aksi APSC, sebagian usul awal Indonesia yang semula ditolak berhasil dimasukkan kembali. VAP berhasil menyelipkan beberapa butir tentang demokrasi dan HAM secara lebih terbuka. Serta adanya kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama ASEAN dalam bidang

⁴¹ *Ibid.* Lihat juga CPF. Luhulima, *op.cit.*, hal. 205.

⁴² Semua ide-ide yang dikemukakan di atas tertuang dalam makalah Rizal Sukma. Lihat juga Mely Caballerro-Anthony, *Regional Security in Southeast Asia* (Singapura: ISEAS, 2005), hal. 270-272. Baca CPF. Luhulima, et al., *op.cit.*

pertahanan dan keamanan maritim serta rencana untuk melibatkan ASEAN dalam *post-conflict peace building*.⁴³

Penutup

Secara teoritik, pendekatan konstruktivisme memberikan sudut pandang alternatif dalam melihat realitas hubungan internasional dan politik-hukum internasional. Pendekatan ini memandang bahwa usul pembentukan APSC oleh Indonesia bukanlah semata-mata didasari oleh kepentingan material dan pertimbangan untung rugi melainkan dapat dianalisis berdasarkan elemen identitas, normatif-ideasional dan moral.

Dalam konteks pembentukan APSC, konstruktivisme memandang bahwa terdapat empat elemen yang memberikan kerangka guna menganalisis perilaku Indonesia sebagai peletak dasar ide pembentukan APSC. Pertimbangan Indonesia didorong oleh elemen *idiography* (identitas) bahwa Indonesia membutuhkan situasi yang aman dan stabil guna memelihara keutuhan wilayah dan masyarakat yang multikultur. Selain itu, karena sejak memasuki alam demokrasi pascareformasi 1998 Indonesia menyadari pentingnya pembangunan nilai-nilai demokrasi dan penegakan HAM sebagai upaya mewujudkan perdamaian yang tidak hanya berbasis negara tetapi juga masyarakat (*people oriented*).

Elemen identitas tersebut didukung oleh tujuan untuk mengembangkan kerja sama bilateral maupun multilateral serta meneguhkan kohesivitas ASEAN dengan adanya situasi yang aman dan stabil. Selain itu, dengan adanya komunitas keamanan, berbagai persengketaan antar negara anggota ASEAN dan dengan negara non-ASEAN dapat diselesaikan. Sebab, salah

⁴³ *Ibid*, hal. 104-105. Untuk lebih lengkap mengenai kerangka kerjasama APSC yang telah disepakati baca ASEAN Secretariat, *ASEAN Political-Security Community Blueprint* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2009).

satu tantangan utama ASEAN sejak awal berdirinya adalah adanya sengketa-sengketa baik teritorial maupun sosial-budaya yang menghambat kerja sama ASEAN.

Dalam upaya mewujudkan hal di atas, elemen *ethical* memberikan kerangka moral berdasarkan prinsip *ASEAN Way* yang selama ini dipelihara seperti prinsip non-intervensi, pembuatan keputusan melalui konsensus, otonomi regional dan kedaulatan nasional serta penyelesaian konflik secara damai tanpa kekerasan. Adapun elemen instrumental sebagai elemen terakhir untuk melihat perilaku Indonesia, menyediakan cara untuk mencapai tujuan yang diharapkan berdasarkan elemen moral yang ada.

Pembentukan APSC diwujudkan dengan terbukanya perhatian pada masalah demokrasi dan HAM untuk menciptakan keamanan regional dan domestik. Serta adanya kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama ASEAN dalam bidang pertahanan dan keamanan maritim serta rencana untuk melibatkan ASEAN dalam *post-conflict peace building*. Terakhir, dalam upaya mewujudkan komunitas keamanan melalui APSC dan *ASEAN Community* secara umum, negara anggota dan masyarakat ASEAN perlu membangun *we feeling* (rasa kekitaan) yang terwujud melalui *one identity*, *one vision* dan *sense of community*.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN Secretariat. *ASEAN Charter* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2008)
- ASEAN Secretariat. *ASEAN Political-Security Community Blueprint* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2009)
- Cipto, Bambang. *Hubungan Internasional Asia Tenggara: Teropong terhadap Dinamika, Realitas dan Masa Depan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
- Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN. *ASEAN Selayang Pandang*. Edisi ke-19 (Jakarta: Sekretariat ASEAN, 2010)
- Luhulima, CPF., et al. *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan P2P LIPI, 2008)
- Luhulima, CPF. *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan P2P LIPI, 2011)
- Meutia, Deni dan Yoga Suharman. *Pembentukan Piagam ASEAN: Tinjauan Konstruktivisme Politik Hukum Internasional*. Makalah dipresentasikan dalam Konvensi Nasional III Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) di HI UMM pada 8-10 Oktober 2012.
- Reus-Smit, Christian. *The Politics of International Law* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2004)